

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**NOMOR 154 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGHARGAAN KEPADA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK  
TAHUN 2018**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

Menimbang : a. bahwa peningkatan kualitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di seluruh K/L/D/I merupakan prasyarat untuk mempercepat reformasi di bidang pengadaan barang/jasa agar lebih efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah;

b. bahwa agar peningkatan kualitas LPSE dan implementasi pengadaan secara elektronik dapat terlaksana dengan lebih cepat, diperlukan upaya memotivasi dalam bentuk penghargaan LPSE;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penghargaan Kepada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Tahun 2018;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 157 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENGHARGAAN KEPADA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2018.**

KESATU : Memberikan penghargaan kepada LPSE berprestasi dalam implementasi pengadaan secara elektronik pada tahun 2018.

KEDUA : LPSE yang mendapatkan penghargaan atas prestasinya dalam implementasi pengadaan secara elektronik pada tahun 2018 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Oktober 2018

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**

ttd

**AGUS PRABOWO**

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP
2. Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP
3. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG PENGHARGAAN KEPADA  
LAYANAN PENGADAAN SECARA  
ELEKTRONIK TAHUN 2018**

**NOMOR : 154 TAHUN 2018  
TANGGAL : 29 Oktober 2018**

**DAFTAR NAMA LPSE BERPRESTASI YANG MENDAPAT PENGHARGAAN  
DALAM IMPLEMENTASI PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2018**

No.	Nama LPSE	Kategori Penghargaan
1.	1. LPSE Kementerian Keuangan 2. LPSE Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 3. LPSE Mahkamah Agung 4. LPSE Badan Informasi Geospasial 5. LPSE Provinsi Jawa Timur 6. LPSE Provinsi DI Yogyakarta 7. LPSE Provinsi Sulawesi Utara 8. LPSE Provinsi Sumatera Utara 9. LPSE Provinsi Kalimantan Utara 10. LPSE Provinsi Kalimantan Selatan 11. LPSE Provinsi Bali 12. LPSE Kota Bandung 13. LPSE Kota Bekasi 14. LPSE Kota Depok 15. LPSE Kota Madiun 16. LPSE Kota Mojokerto 17. LPSE Kota Pangkal Pinang 18. LPSE Kota Pariaman 19. LPSE Kota Pekanbaru 20. LPSE Kota Denpasar 21. LPSE Kota Mataram 22. LPSE Kota Banjarbaru 23. LPSE Kabupaten Bandung Barat 24. LPSE Kabupaten Bangka 25. LPSE Kabupaten Bangka Barat 26. LPSE Kabupaten Bangka Tengah 27. LPSE Kabupaten Barito Selatan 28. LPSE Kabupaten Belitung 29. LPSE Kabupaten Belitung Timur 30. LPSE Kabupaten Blitar 31. LPSE Kabupaten Ciamis 32. LPSE Kabupaten Dharmasraya 33. LPSE Kabupaten Lebak 34. LPSE Kabupaten Madiun 35. LPSE Kabupaten Musi Banyuasin 36. LPSE Kabupaten Pelalawan 37. LPSE Kabupaten Pesisir Selatan 38. LPSE Kabupaten Ponorogo 39. LPSE Kabupaten Probolinggo	Komitmen Penerapan Standar LPSE : 2014



	40. LPSE Kabupaten Siak 41. LPSE Kabupaten Sidoarjo 42. LPSE Kabupaten Solok 43. LPSE Kabupaten Solok Selatan 44. LPSE Kabupaten Subang 45. LPSE Kabupaten Tuban 46. LPSE Kabupaten Tangerang 47. LPSE Kabupaten Serang 48. LPSE Universitas Udayana 49. LPSE Universitas Gadjah Mada	
2.	1. LPSE Provinsi Jawa Tengah 2. LPSE Kota Salatiga 3. LPSE Kota Surakarta 4. LPSE Kabupaten Banyumas 5. LPSE Kabupaten Demak 6. LPSE Kabupaten Jepara 7. LPSE Kabupaten Karanganyar 8. LPSE Kabupaten Kudus 9. LPSE Kabupaten Purbalingga 10. LPSE Kabupaten Rembang 11. LPSE Kabupaten Sragen 12. LPSE Kabupaten Wonosobo 13. LPSE Universitas Negeri Semarang 14. LPSE Universitas Diponegoro	Komitmen LPSE dalam Penerapan SPSE CA
3.	1. LPSE Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 2. LPSE Provinsi Maluku Utara 3. LPSE Provinsi Sulawesi Tenggara 4. LPSE Provinsi Sumatera Selatan 5. LPSE Kabupaten Way Kanan 6. LPSE Kabupaten Sinjai 7. LPSE Kabupaten Kulonprogo 8. LPSE Kabupaten Halmahera Timur 9. LPSE Kabupaten Barito Selatan	Komitmen 100% <i>eProcurement</i>
4.	1. LPSE TNI AD 2. LPSE Kepolisian Negara Republik Indonesia	Komitmen Peningkatan Layanan LPSE

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**

ttd

**AGUS PRABOWO**